

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)



**PEMERINTAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2022**



BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN KAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
1									

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEGIATAN TEKNIS	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN LAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJAUAN REKOMENDASI DPRD
1	Komunikasi dan informasi	Dinas komunikasi dan informasi	UU Nomor 25 Tahun 2009	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota 1. Administrasi keuangan perangkat daerah 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan barang milik daerah 5. Penunjang urusan pemerintahan daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	2.656.389,737 2.199.895,782 (82,82%) 204.249.400 (99,92%) 25.500.000 (99,57%) 82.306.800	78.001.100	- - - - -	1. Penambahan tenaga IT 1 orang di tahun 2022 2. Tidak ada. Penambahan karena anggaran tidak tersedia 3. Hanya saja sebatas perencanaan	

2	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.	Dinas Komunikasi dan Informatika		urusan Pemerintah Daerah Program Informasi dan Komunikasi Publik 1. Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.900.000 (99,57)	-	-	dan penentuan lokasi kantor melalui RT RW di tahun 2022 4. Belum bisa terlaksana, karena anggaran tidak tersedia untuk pengembangan PPID dan command center
3	Bidang E-Government dan Aprika	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Aplikasi Informatika 1. Pengelola Nama Domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat dan sub Domain di lingkup pemerintah Daerah Kab/Kota 2. Pengelola E-government Dilingkup pemerintah Daerah kab/kota	1.606.084.000	1.603.284.000 (99,09%)	-	-	
					356.042.000	340.171.300 (88,55%)	-	-	
4	Bidang Urusan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	9.448.500	9.387.800 (99,46)	-	-	

5	Bidang Urusan Persandian	Dinas komunikasi dan informatika	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	9.448.500	9.397.800 (99,46%)	-	-
			1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota				
			2. Penetapan hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah Kab/kota	82.410.000	79.348.500 (96,29%)	-	-

3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1		

3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya. Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran sebelumnya dituangkan dalam format sebagai berikut:

No	Rekomendasi DPRD tahun N-1 (tahun 2021)	Tindak Lanjut	Tujuan/masalah yang di selesaikan
1	Untuk Meningkatkan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika perlu penambahan tenaga IT yang berkompeten	Penambahan Tenaga IT 1 Orang di tahun 2022	
2	Untuk Meningkatkan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika ke daerah daerah yang tidak terjangkau Sinyal (Blank Spot) perlu penambahan Mobil Dinas double Gardan	Tidak ada. Penambahan karena anggaran tidak tersedia	
3	Untuk meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika perlu adanya kantor baru yang representatif	Hanya saja sebatas perencanaan, dan penentuan lokasi kantor melalui RTRW di tahun 2022.	
4	Seiring kerjasama Pemda Pasaman Barat dengan Pemko Bandung tentang kerjasama Smart City khususnya tentang pengadaan Command Center berimbas terhadap perlunya dukungan anggaran yang cukup dan pemerintah daerah untuk pelaksanaannya.	Dilaksanakan di Tahun 2022, karena anggaran tersedia di tahun 2022 untuk pengembangan PPID dan Command center.	

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

EDY MURDANI, SH

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19670822 198803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Sockarno Hatta No.29 Telp. (0753) 466262 fax. (0753) 466170-Simpang Empat 26515
Website : WWW.kominfo.pasamanbaratkab.go.id
email:diskominfo@pasamanbaratkab.go.id

1. Penentasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

2. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Uraian	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Kominfo	Penentasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	$\frac{43}{43} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

3. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Uraian	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	1) Penentasan perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	$\frac{43}{43} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
	2) Penentasan perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah pengguna akses internet berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah seluruh OPD}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	$\frac{68}{68} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	-Youtube - Facebook -Instagram - Website	Ada 4	

2. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	$\frac{\text{Jumlah layanan public diselenggarakan secara online dan terintegrasi}}{\text{Jumlah layanan publik}} \times 100\% = 0\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		1) Persentase kegiatan Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015 Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah	$\frac{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No 5/2015}}{\text{Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah}} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
2)		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{26}{32} \times 100 = 83,2\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
3)		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{32}{32} \times 100 = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
4)		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{\text{Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	$\frac{21}{28} \times 100 = 75\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
5)		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{\text{Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik}}{\text{Jumlah layanan}} \times 100\%$	$\frac{1}{29} \times 100 = 3,44\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		6)	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah system elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan}}{\text{Jumlah system elektronik}} \times 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		7)	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	$\frac{5}{29} \times 100 = 17,24 \%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		8)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{32}{32} \times 100 = 100 \%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		9)	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{30}{32} \times 100 = 93,75\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		10)	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	$\frac{30}{32} \times 100 = 93,75\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2021)	Capaian Kinerja 2022	Keterangan
		11) Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{\text{Jumlah data yang dapat berbagi pakai}}{\text{Jumlah data yang dimiliki penda}} \times 100\%$	$\frac{0}{32} \times 100 = 0\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city}}{\text{Jumlah perangkat daerah}} \times 100\%$	$\frac{32}{32} \times 100 = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	$\frac{\text{Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi dibawah pengelolaan Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah ASN pengelola TIK}} \times 100\%$	$\frac{0}{4} \times 100 = 0\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Cukup jelas	Ada	

3. Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Program Prioritas Pemerintah Kab/Kota

a. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Outcome)

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Rumus	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Kominfo	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Program Prioritas Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kab/kota}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{279.454}{279.454} \times 100 = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Output)

No	Urutan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Rumus (Data tahun 2020)	Capaian Kinerja 2020	Keterangan
	Kominfo	1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah $\times 100\%$ Jumlah komunitas masyarakat atau mitra komunikasi pemerintah daerah provinsi	$\frac{76}{26} \times 100 = 34,2\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi $\times 100\%$ Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	$\frac{4}{4} \times 100 = 100\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)
		3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP $\times 100\%$ Jumlah diseminasi dan layanan informasi public	$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$	Dibuat dalam bentuk daftar (yang ditandatangani kepala dan distempel basah)

Simpang Empat, Januari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika



Edy Murdani, SH
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19670822 198803 1 004